

**KONTRIBUSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA  
DESA PADA DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU  
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh :

**SELVI SAUWALI  
NIM : E21 19 278**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KONTRIBUSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN  
DANA DESA PADA DESA SALILAMA KECAMATAN  
MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

Oleh

**SELVI SAUWALI  
E21.19.278**

**SKRIPSI**

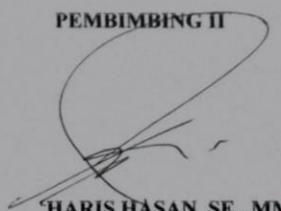
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
Gorontalo, 08 November 2021

**PEMBIMBING I**



**TAMSIR, SE, MM**  
NIDN : 0920057403

**PEMBIMBING II**



**HARIS HASAN, SE, MM**  
NIDN : 0908108407

## HALAMAN PERSETUJUAN

### KONTRIBUSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

Oleh

**SELVI SAUWALI**  
**E21.19.278**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

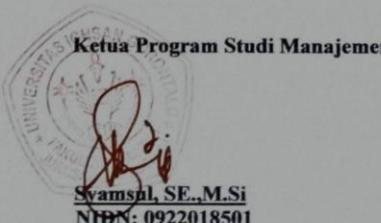
1. Sulaiman, SE., MM
2. Ng Syamsiah. B, SE., MM
3. Sri Dayani Ismail, SE., MM
4. Tamsir, SE., MM
5. Haris Hasan, SE., MM

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ekonomi**



**Ketua Program Studi Manajemen**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO**

*“...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  
(Al-Insyiroh:6-8)*

*“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri...”(Q.S  
ArRa'dyat 13)*

*“Semua impian dapat menjadi kenyataan andaikan kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya” (SELVI SAUWALI)*

### **PERSEMBAHAN**

1. Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada Nyalah kita menyembah dan kepdanyalah kita memohon pertolongan.
2. kepada almarhum abutercinta yang telah melahirkansaya, Ayah dan ibu Tiri yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan, dukungan serta memberikan motivasi.

ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
2021

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 08 November 2021



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Haris Hasan, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Kepala Desa pada Desa Salilama, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini. Rekan-rekanku mahasiswa sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Nilda, Rawi, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 11 November 2021

( **Penulis** )

## ***ABSTRACT***

***SELVI SAUWALI. E2119278. CONTRIBUTION OF CONTROL TO VILLAGE FUND MANAGEMENT AT SALILAMA VILLAGE, MANANGGU SUBDISTRICT, BOALEMO DISTRICT***

*The management of the village fund budget provided by the government to follow its objectives is necessary for a management function implementation in each management process. The purpose of this study is to find and analyze the contribution of supervision to the management of village funds in the village of Salilama, Mananggu Subdistrict, Boalemo District. Based on the data analysis using SPSS-16, it can be obtained that the value of R Square ( $r^2$ ) is 0.250 or 25%, which means that the supervision contribution affects village financial management by 0.250. In addition, the coefficient of determination explains that if the supervisory system affecting the village financial management has increased by one unit, the village financial management in Salilama Village, Mananggu Subdistrict, Boalemo District results in 25%, while the remaining 75% is explained by other variables outside of the model.*

*Keywords:* supervision, village financial management

**ABSTRAK**

## **SELVI SAUWALI. E2119278. KONTRIBUSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

Pengelolaan anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,250 atau 25%. Yang berarti bahwa besarnya kontribusi pengawasan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,250. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika sistem pengawasan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sebesar 25%, sedangkan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

Kata kunci: pengawasan,pengelolaan keuangan desa

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	6
2.1.Desa .....	6
2.1.1. Pengertian Desa .....	6
2.1.2. Pemerintah Desa .....	7
	8
x	8
	9

2.2. Dana Desa .....	.....
2.2.1. Pengertian Dana Desa .....	.....
2.2.2. Sumber-Sumber Keuangan Desa .....	.....
2.2.3. Pengelolaan Dana Desa .....	.....
2.2.4. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa .....	.....
2.3. Pengawasan .....	.....
2.3.1. Pengertian Pengawasan .....	.....
2.3.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	.....
2.3.2. Konsep Pengawasan .....	.....
2.3.3. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	.....
2.4. Kerangka Pikir .....	.....
2.5. Hipotesis .....	.....
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	.....
3.1. Objek Penelitian.....	.....
3.2. Metode Penelitian .....	.....
3.2.1. Desain Penelitian .....	.....
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data .....	.....
3.2.3. Populasi dan Sampel .....	.....
3.2.4. Defenisi Operasional Penelitian .....	.....
3.2.5. Teknik Analisis Data .....	.....
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	.....

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif .....	34
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan .....	35
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengawasan .....	39
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>44</b>
5.1. Kesimpulanan .....	44
5.2. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>47</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian .....	25
Tabel 4.1. Daftar Nama Kepala Desa .....	30
Tabel 4.2. Susunan Aparat Desa .....	31
Tabel 4.3. Aspek Ekonomi .....	31
Tabel 4.4. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden .....	34
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Indikator Transparan .....	35
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Indikator Akuntabel .....	36
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Indikator Partisipasi .....	38
Tabel 4.8. Rekapan Tanggapan Responden Variabel Pengelolaan Keuangan..	39
Tabel 4.9. Tanggapan Responden Indikator Pengelolaan Keuangan .....	39
Tabel 4.10. Tanggapan Responden Variabel Pengawasan .....	41
Tabel 4.11. Tabel <i>Coefficients</i> .....	41
Tabel 4.12. Tabel <i>Model Summary</i> .....	42
Tabel 4.13. Tabel ANOVA .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Pikir .....	22
Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Jadwal Penelitian .....	47
Lampiran 2. Kuisioner .....	48
Lampiran 3 Tabulasi Data .....	51
Lampiran 4 Frequency Variabel Y .....	53
Lampiran 5 Frequency Variabel X .....	56
Lampiran 6 Output Regression .....	58
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian .....	59
Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian .....	60
Lampiran 9 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	61
Lampiran 10 Hasil Turnitin .....	62
Lampiran 11 Curriculum Vitae .....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpakkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Dana Desa. Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Anggaran dana desa adalah dana yang di Anggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Anggaran dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan

sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan Anggaran dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan Anggaran dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan Anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan Anggaran dana desa di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Anggaran Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa

situasi penggunaan Anggaran dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Anggaran Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan Anggaran Dana Desa, pengelolaan Anggaran Dana Desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana Anggaran Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul “Kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengawasan mempengaruhi pengelolaan dana desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal pengelolaan dan pengawasan Dana Desa pada Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kantor Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada aparat Kantor Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.
- b. Bagi Penulis  
Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya kususnya pada obyek yang diteliti.
- c. Bagi Pihak LuarSebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.
- d. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Desa**

##### **2.1.1. Pengertian Desa**

Menutur Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datu di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

### **2.1.2. Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa atau pembantu desa. Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

## **2.2. Dana Desa**

### **2.2.1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

### **2.2.2 Sumber-Sumber Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencangkup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direlokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian/Lembaga yang akan direlokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian/Lembaga bisa direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

### **2.2.3. Pengelolaan Dana Desa**

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi: pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan

pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

#### **2.2.4. Asas Pengelolaan Dana Desa.**

##### **1. Transparan**

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya

transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

## **2. Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Partisipatif**

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik

kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

### **2.3. Pengawasan**

#### **2.3.1. Pengertian Pengawasan**

Menurut Widodo (2001:120) mendefinisikan pengawasan (*control*) sebagai: proses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut pendapat Sujamto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai: Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di kesimpulkan bahwa pengawasan/ kontrol merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Widodo (2001:173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan tadi. Sedangkan menurut Rahman (2007:127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan eksekutif oleh legislatif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan atau peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislative terhadap

eksekutif. Maksud dari dilaksanakannya pengawasan Menurut Leonard dalam Situmorang (1994:23) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
2. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

### **2.3.2. Konsep Pengawasan**

Menurut Dale yang di kutip Winardi (2011:224) Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskanya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkanya. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2005:125), pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Simbolon (2004:61) mengemukakan bahwa, pengawasan ialah suatu proses diman pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahanya sesuai dengan rencana,perintah,tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan.
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).

3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan/direncanakan. Dengan adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan yang telah terjadi diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang di kemudian hari.

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi (2011:589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain:

- a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

- b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

*Cocurrent Control* terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction Control* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk :

1. Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
  2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi caradengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-orang yang memberikn penyerahan.
- c. Pengawasan *Feed back* (*Feed back Control*) Sifat khas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode Pengawasan *feed back* yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu :
1. Analisis Laporan Keuangan
  2. Analisis Biaya Standar
  3. Pengawasan Kualitas
  4. Evaluasi Hasil Pekerjaan

### **2.3.2. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Menurut Peters dalam Widodo (2001:173) mengemukakan bahwa untuk melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (*organizational methods*). Kedua, metode kontrol politik (*political methods of control*). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan “*popular and legal sanctions within the organizational to gaincompliance*”(sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan

metode kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (*publicity*), disiplin internal (*internal discipline*), penekan kelompok dan publik (*group and public pressures*).

Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo (2001:177) dapat dilakukan dengan “*funding, investigation, constituency service, and postaudit*”.

### 1. Penganggaran (*Funding*)

Penganggaran perogram (*Program funding*) merupakan salah satualat lembaga legislatif dalam melakukan control kepada birokrasi dengan mengontrol perogram yang akan dianggarkan.

### 2. Investigasi (*Investigation*)

Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol,bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah dengar pendapat dengan pemerintah.

### 3. Pelayanan Publik (*Constituennce service*)

Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.

4. Posaudit (*Postaudit*) Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Pos audit yaitu pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan perogram anggaran yang direncanakan.

#### **2.4. Kerangka Pikir**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

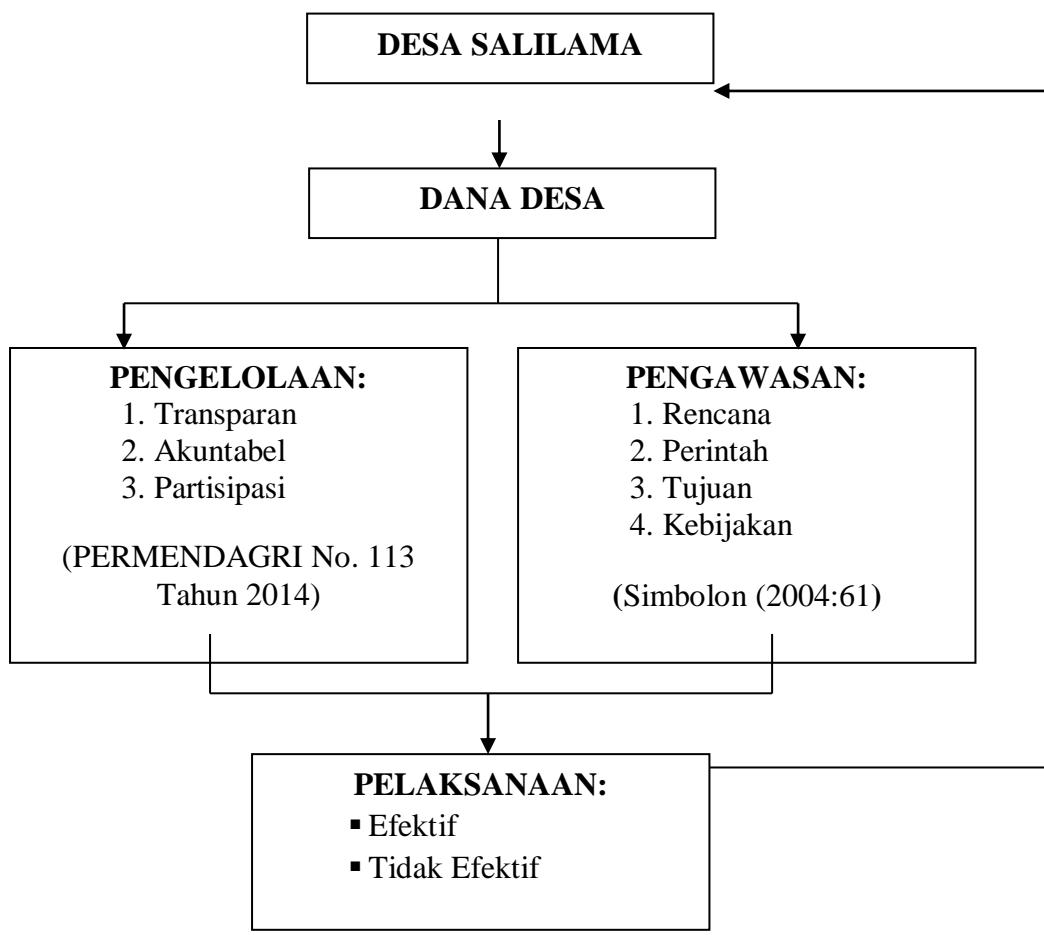
Dalam konteks penelitian ini, variabel Pengelolaan Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif

Pengawasan di ukur menggunakan empat indikator menurut Simbolon (2004:61). Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan.
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut



**Gambar 2.1 : Kerangka Pikir**

## 2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I, kajian teori pada Bab II dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah: “Pengelolaan dan pengawasan Dana Desa pada desa Salilama Kecamatan Mananaggul Kabupaten Boalemo sudah berjalan dengan efektif.”

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Obyek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

#### **3.2. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sugiyono (2007:109). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa pada Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa pada Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan melalui responden yang ada di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo) dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014; 84). Memperhatikan pendapat Nazir, maka penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan:

###### **1. Perencanaan**

Perencanaan mencakup: identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan perumusan masalah.

###### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan mencakup: pengumpulan data (populasi, sampel dan pengembangan instrumen), pengujian instrumen, analisis data dan kesimpulan dan saran.

### **3.2.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. *Library Research*

*Library research* bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. *Field Research* *Field reserach* bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Kuisisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

### **3.2.3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berjumlah 40 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

### **3.2.4. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46). Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke

dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian.

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Pengelolaan Dana Desa (Y) (PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014)	1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipasi	1. Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh 2. Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi 3. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan 4. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab 1. Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan 2. Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan 3. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut 4. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan 1. Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa 3. Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa 4. Masyarakat desa memberikan

		penilaian pelaksanaan anggaran desa
Pengawasan (X) (Simbolon (2004:61)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana</li> <li>2. Perintah</li> <li>3. Tujuan</li> <li>4. Kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dana desa dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan perencanaan.</li> <li>2. Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan dana desa dan sesuai dengan perintah.</li> <li>3. Pengawasan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.</li> </ol>

### 3.2.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Regresi Sederhana

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari bentuk secara simultan (bersama-sama) dan parsial (sendiri-sendiri) antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (Pengelolaan Keuangan Desa)

a = Koefisien regresi (konstanta)

b = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal

X = Variabel independent Sistem Pengendalian Internal

$\epsilon$  = Pengaruh Variabel Lain

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien

Determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas.

Menurut Ghazali (2016:97) nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### **3. Uji Hipotesis**

Uji signifikansi digunakan untuk menguji kewajaran atau kelayakan hasil penelitian dengan menggunakan uji t dan uji F, Widayat (2002 : 104). Untuk itu uji hipotesis penelitian korelasi parsial digunakan uji t dan korelasi secara simultan uji F. Analisis data kuantitatif menggunakan program SPSS, dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf  $\alpha = 5\%$ .

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### A. Sejarah Desa

Desa Salilama merupakan Desa yang di Mekarkan dari Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kab Boalemo yang pada saat itu Kepala Desanya adalah “SUDE ETANGO”, dengan adannya semangat , perjuangan dan kerja keras dari tokoh masyarakat dan Panitia Pemekaran Desa Salilama maka lahirlah Desa salilama 17 Februari 1979 yang diberi nama “Desa Salilama” yang kemudian Desa Salilama sebagai Penjabat Kepala Desa adalah “EMBA AHMAD PALELE” selama ± 1 Tahun kemudian pada tahun 1980-1985 Desa Salilama memiliki Kepala Desa A.R HUWOLE Tahun 1985-1986 Desa salilama memiliki Penjabat Kepala Desa Yaitu R.D BOTUTIHE selama ± 1 Tahun, Kemudian Tahun 1986 samai pada tahun 1987 terjadi pergantian Penjabat menjadi ADIMAN ADJAMI selama ± 1 Tahun, dan Tahun 1987 sampai tahun 1989 kembali terjadi pergantian pejabat menjadi DJABIR PAKAYA selama ± 2 Tahun, pada tahun 1989 sampai 1999 Kepala Desa dipegang oleh SULEMAN AHMAD, dan pada tahun 1999 sampai 2008 yang menjadi Kepala Desa Salilama adalah ABD RAHMAN PARAMANI, dan pada tahun 2008 sampai 2015 . Desa dipimpin oleh MUSA HANANI, Tahun 2016 sampai 2022 memiliki Kepala Desa MUSA HANANI yang dipilih dan Lahir secara Demokratis pada pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 November 2015 ,sehingga bapak Musa Hanani dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan SK Bupati Tahun 343 Tahun 2015.

**Tabel 4.1.**  
**Nama – Nama kepala Desa Salilama**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2011-2015	Musa Hanani	Kades Definitif
2	2016-2022	Musa Hanani	Kades Definitif
3	2011 – sekarang 2019	Musa Hanani	Kades Definitif

##### B. Letak Geografis

Berdasarkan administrasi setempat Desa Salilama Terletak di kecamatan Mananggu yang berjarak 1000 Meter dari Pusat Kecamatan Mananggu luas Desa 1800 Ha yang terbagi dalam 3 Dusun yakni.

- Dusun Palato Barat
- Dusun Palato Timur
- Dusun Palato Utara

Dengan batas –batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Berbatasan dengan Desa Bendungan
- b. Timur : Berbatasan dengan Desa Pontolo
- c. Seatan : berbatasan dengan Desa Kramat
- d. Barat : berbatasan dengan Desa Kaaruyan

### C. Aspek Sumberdata Aparatur Pemerintah Desa

Desa Salilama Secara Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dikelolah oleh dua elemen Utama,yakni elemen Pemerintah Desa yang dipimpin langsung Oleh Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa Yang terdiri dari

**Tabel 4.2. Susunan Aparat Desa**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Musa Hanani	Kepala Desa	SMA
2	Merti Djakaria	Sekdes	S1
3	Lisnawaty Dama	Bendahara	SMA
4	Anwar Daulima	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Hayati Sauwali	Kaur Umum	SMA
6	Ratna Tialo	Kaur Pembangunan	SMA
7	Nofry Daulima	Operator Computer	SMK
8	Husain Masi	Kadus Palato Barat	SD
9	Djafar Lensun	Kadus Palato Timur	SMA
10	Ahmad Bumulo	Kadus Palato Utara	SD

Selain elemen Pemrintah Desa. elemen Terpenting sebagai Mitra Peneyelenggraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salilama adalah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) serta Masyarakat pada Umumnya.

#### **D. Aspek Ekonomi**

Perekonomian di Desa Salilama secara umum didominasi pada sektor pertanian dan perikanan.

Tabel Penggunaan Lahan

**Tabel 4.3. Aspek Ekonomi**

No	Jenis Usaha Tani	Jumlah Luas Tanah	Jumlah KK Petani	Rata2 Luas Perorang an	Produksi tingkat kecamatan	Ket
1	Lahan Sawah Irigasi	52 Ha	33 KK	1 Ha		
3	Lahan Kering Jagung	97 Ha	40 KK	1 Ha		
4	Lahan Kering Kelapa	113,12 Ha	35 KK	1Ha		

#### **E. Aspek Pendidikan**

Kesadaran tentang Pentingnya Pendidikan terutama pendidikan 9 Tahun samakin meningkat sehingga jumlah lulusan SD dan SMP mendominasi Peringkat Pertama

#### **F. Aspek Sosial Budaya**

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat di Desa Salilama,serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun Demikian Pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan di dalam pembangunan yang bersifat Mobilisasi Masa.di samping itu masyarakat Salilama cenderung memiliki sifat ekspresif.agamis dan terbuka,dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

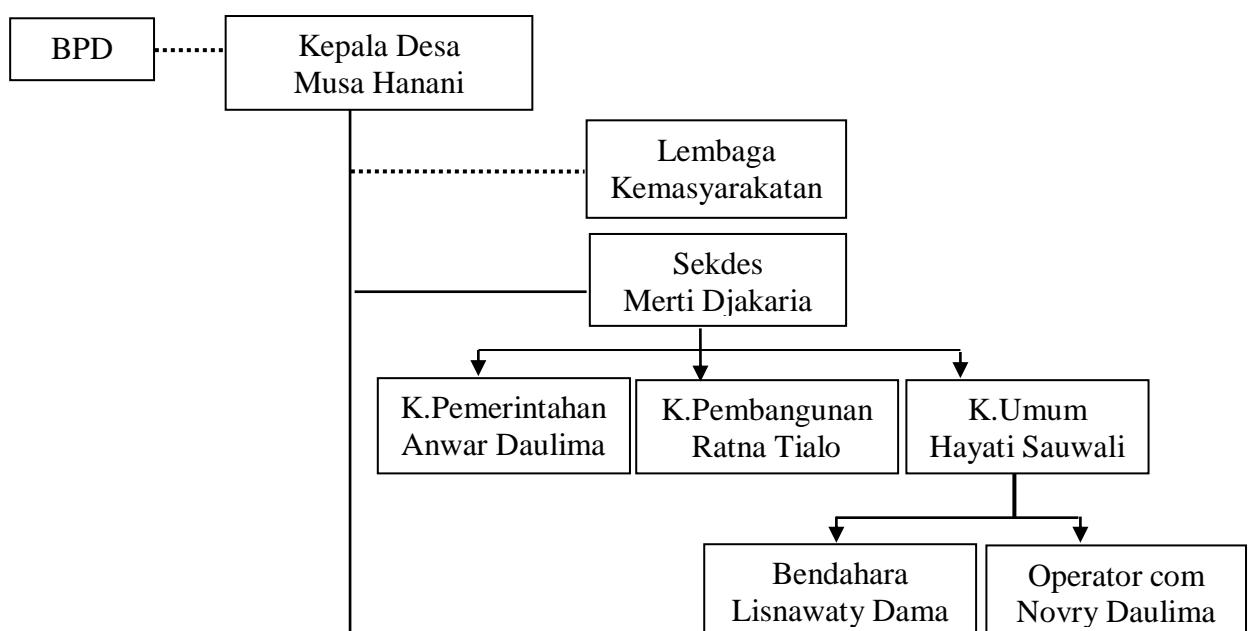
## G. Aspek Pemuda dan Olahraga

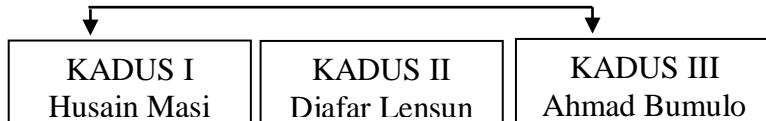
Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah penduduk dengan komposisi usia Muda, memerlukan perhatian serius, mengingat munculnya permasalahan - permasalahan kenakalan remaja, pengangguran, penyalagunaan obat - obatan terlarang dan tindak kriminal.

Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak kedalam tindak / perilaku yang kurang baik, kesemuanya ini sangat terkait dengan pembinaan mental, sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan, masalah pendidikan, pembinaan Olahraga, pengembangan sanggar seni budaya generasi Mudah serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreatifitas, tanggungjawab, dan kemandirian para pemuda sertamenciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi Muda.

## H. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO





Struktur Organisasi Di Atas Dapat Menjelaskan tentang tugas-tugas dan fungsi bagi setiap perangkat desa. Kepala desa dalam menjalankan semua kebijakan dan programnya, tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa ( BPD ) sebagai lembaga yang mengawasi semua kebijakan dan keputusan kepala desa, termasuk dapat memberikan teguran apabila kebijakan-kebijaan tida berpihak pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, untuk sekretaris desa yang dibantu operator desa bertanggung jawab sepenuhnya membantu kepala desa dalam hal administrasi yang ada di desa, selanjutnya sekretaris desa dapat mewakili kepala desa apabila kepala desa berhalangan dalam menghadiri hajatan atau lain sebagainya yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif**

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel pengawasan (X), sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan dana desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden =  $1 \times 1 \times 40 = 40$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden =  $5 \times 1 \times 40 = 200$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$200 - 40$$

Rentang Skala = ----- = 32

**Tabel 4.4.**  
**Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden**

Range	Kategori
172 – 204	Sangat Baik
139 – 171	Baik
106 – 138	Kurang Baik
73 – 105	Tidak Baik
40 – 72	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2021

#### **4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)**

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 12 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5. Tanggapan Responden  
Pada Indikator Transparan**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	14	70	35	14	70	35	22	110	55	16	80	40
4	22	88	55	24	96	60	14	56	35	22	88	55
3	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5
2	2	4	5	0	0	0	2	4	5	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	40	168	100	40	172	100	40	176	100	40	174	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 22 responden atau 55% yang menjawab setuju dengan skor 88, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 4, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab tidak setuju sehingga total skor item 1 adalah 168.

Untuk pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 24 responden atau 60% yang menjawab setuju dengan skor 96, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 2 adalah 172.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 22 responden atau 55% yang menjawab sangat setuju dengan skor 110, sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 56, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 4, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab tidak setuju dengan skor 6, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4 sehingga total skor item 3 adalah 178.

Untuk pernyataan tentang Penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 22 responden atau 55% yang menjawab setuju dengan skor 88 dan 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 174.

**Tabel 4.6. Tanggapan Responden  
Pada Indikator Akuntabel**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	40	10	50	25	18	90	45	14	70	35
4	24	96	60	30	120	75	22	88	55	24	96	60
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	40	176	100	40	170	100	40	178	100	40	172	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 24 responden atau 60% yang menjawab setuju dengan skor 96, sehingga total skor item 1 adalah 176.

Untuk pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 25% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 30 responden atau 75% yang menjawab setuju dengan skor 120, sehingga total skor item 2 adalah 170.

Untuk pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 22 responden atau 55% yang menjawab setuju dengan skor 88, sehingga total skor item 3 adalah 178.

Untuk pernyataan tentang Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 24 responden atau 60% yang menjawab setuju dengan skor 96 dan 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 172.

**Tabel 4.7. Tanggapan Responden  
Pada Indikator Partisipasi**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	20	100	50	24	120	60	24	120	60	8	40	20
4	16	64	40	16	64	40	14	56	35	30	120	75
3	2	6	5	0	0	0	0	0	0	2	6	5
2	2	4	5	0	0	0	2	4	5	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	40	174	100	40	184	100	40	180	100	40	166	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 20 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 100, sebanyak 16 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 64, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 1 adalah 174.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 16 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 64, sehingga total skor item 2 adalah 184.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 56 dan 2 responden atau

5% yang menjawab tidak setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 3 adalah 180.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 20% yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 30 responden atau 75% yang menjawab setuju dengan skor 120 dan 2 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 166.

**Tabel 4.8.**  
**Rekapan tanggapan Responden**  
**Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)**  
**Statistics**

	Pengelolaan	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N Vali	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Miss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	2090	168	172	176	174	176	170	178	172	174	184	180	166

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan analisis deskriptif data pada variabel pengelolaan (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel pengelolaan (Y) yaitu rata-rata sebesar 174.

#### **4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengawasan (X)**

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 4 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.9. Tanggapan Responden  
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	36	180	90	34	170	85	28	140	70	36	180	90
4	4	16	10	6	24	15	12	48	30	4	16	10
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	40	196	100	40	194	100	40	188	100	40	196	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 36 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 180, sebanyak 4 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 16, sehingga total skor item 1 adalah 196.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 34 responden atau 85 yang menjawab sangat setuju dengan skor 170, sebanyak 6 responden atau 15% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 2 adalah 194.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 28 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 140, sebanyak 12 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 48, sehingga total skor item 3 adalah 188.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 36 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 180, sebanyak 4 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 16, sehingga total skor item 4 adalah 196.

**Tabel 4.10.**  
**Rekapan tanggapan Responden**  
**Variabel Pengawasan (X)**

Statistics						
	Pengawasan	X1	X2	X3	X4	
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
	Sum	774	196.00	194.00	188.00	196.00

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengawasan (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel pengelolaan keuangan desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 194.

### 4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil persamaan regresi :  $Y = 15,474 + 1,901X + \epsilon$

**Tabel 4.11. Coefficients  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.474	10.351		1.495	.143
Pengawasan	1.901	.535	.500	3.555	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda dimana nilai constant 15,474 yang berarti jika variabel pengawasan di asumsikan sama dengan 0, maka pengelolaan keuangan desa di desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo adalah sebesar 15,474.

Koefisien variabel pengawasan (X) sebesar 1,901 yang bermakna bahwa perubahan variabel pengawasan (X) akan di ikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan desa sebesar **1,901** dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian internal (X) terhadap variabel pengelolaan keuangan desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo secara simultan, maka peneliti gunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) berikut ini.

**Tabel 4.12. Model Summary**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 <sup>a</sup>	.250	.230	2.211

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,250 atau 25%. Yang berarti bahwa besarnya kontribusi pengawasan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,250. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika sistem pengawasan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa pada desa Salilama Kecamatan

Mananggu Kabupaten Boalemo sebesar 25%, sedangkan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

### 3. Uji Hipotesis

Uji signifikan digunakan untuk menguji kelayakan hasil penelitian, dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.13. ANOVA**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.769	1	61.769	12.638
	Residual	185.731	38	4.888	
	Total	247.500	39		

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

b. Dependent Variable: Pengelolaan

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh F hitung sebesar  $12.638 > \text{sig.}$  sebesar 0,001 berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya hubungan antara pengawasan (X) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sebesar 12.638 adalah signifikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa nilai R Square R Square sebesar 0,250 atau 25%. Yang artinya kontribusi pengawasan mempunyai kontribusi sebesar 25% terhadap pengelolaan keuangan desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel pengawasana terhadap pengelolaan keuangan dengan menggunakan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,495 dengan taraf signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hal ini berarti variabel pengawasana (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan desa (Y).

#### **5.2. Saran-Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi :

1. Diharapkan Pemerintah Desa menerapkan fungsi pengawasan dalam mengelola keuangan desa di Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Adisty C. (2012). *Asuhan Gizi Nutritional Care Process*. Yogyakarta
- Chung, N. T., et all. 2015. *Impact of Seasonal Climate Variability on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia*.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program I B M S P S S. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kumaat, Valarey G. (2011). *Internal Audit*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I*. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D".Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
- \_\_\_\_\_, No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- \_\_\_\_\_, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
- Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- W. J. S. Poerwadarminta 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

**Lampiran 1****JADWAL PENELITIAN**

Kegiatan	Tahun 2021										
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
Observasi											
Usulan Judul											
Penyusunan Proposal dan Bimbingan											
Ujian Proposal											
Revisi Proposal											
Pengolahan Data & Bimbingan											
Ujian Skripsi											
Revisi Skripsi											

**Lampiran 2**  
**KUISIONER**

Responden yang Terhormat,

Saya atas nama Selvi Sauwali, akan mengadakan penelitian dengan judul “Kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo” sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Ichsan Gorontalo. Bersama ini saya mohon kesediaannya untuk mengisi data kuesioner yang diberikan, informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

**PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER**

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

### A. PENGELOLAAN DANA DESA

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					

No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

**B. PENGAWASAN DANA DESA**

No	Pernyataan Indikator Rencana, Perintah, Tujuan dan Kebijakan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pengawasan dana desa dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan perencanaan					
2	Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan dana desa dan sesuai dengan perintah					
3	Pengawasan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi					
4	Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.					

**Lampiran 3****TABULASI DATA**

Z	Pengelolaan Dana Desa (Y)												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	<b>54</b>
2	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	<b>54</b>
3	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	2	3	<b>48</b>
4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	<b>52</b>
5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	<b>55</b>
6	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	<b>54</b>
7	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	<b>55</b>
8	2	5	4	3	5	4	4	5	5	4	5	4	<b>50</b>
9	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	<b>53</b>
10	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	<b>53</b>
11	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	<b>49</b>
12	4	4	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	<b>52</b>
13	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	<b>55</b>
14	4	3	2	5	5	4	4	4	4	4	5	4	<b>48</b>
15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>49</b>
16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	<b>50</b>
17	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	<b>57</b>
18	5	5	5	5	4	4	4	2	5	4	4	4	<b>52</b>
19	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	<b>53</b>
20	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	<b>52</b>
21	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	<b>54</b>
22	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	<b>54</b>
23	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	2	3	<b>48</b>
24	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	<b>52</b>
25	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	<b>55</b>
26	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	<b>54</b>
27	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	<b>55</b>
28	2	5	4	3	5	4	4	5	5	4	5	4	<b>50</b>
29	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	<b>53</b>
30	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	<b>53</b>
31	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	<b>49</b>
32	4	4	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	<b>52</b>
33	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	<b>55</b>
34	4	3	2	5	5	4	4	4	4	4	5	4	<b>48</b>
35	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>49</b>
36	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	<b>50</b>
37	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	<b>57</b>
38	5	5	5	5	4	4	4	2	5	4	4	4	<b>52</b>
39	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	<b>53</b>
40	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	<b>52</b>

N	Pengawasan (X)				Jml
	1	2	3	4	
1	5	5	5	5	<b>20</b>
2	5	5	5	5	<b>20</b>
3	5	5	4	5	<b>19</b>
4	5	5	5	5	<b>20</b>
5	5	5	5	5	<b>20</b>
6	5	5	5	5	<b>20</b>
7	5	5	5	5	<b>20</b>
8	5	5	5	4	<b>19</b>
9	5	5	5	5	<b>20</b>
10	5	5	4	5	<b>19</b>
11	4	5	5	5	<b>19</b>
12	5	5	5	5	<b>20</b>
13	5	5	4	5	<b>19</b>
14	5	5	4	5	<b>19</b>
15	5	4	5	5	<b>19</b>
16	5	5	4	5	<b>19</b>
17	5	5	5	5	<b>20</b>
18	4	5	4	5	<b>18</b>
19	5	4	5	5	<b>19</b>
20	5	4	5	4	<b>18</b>
21	5	5	5	5	<b>20</b>
22	5	5	5	5	<b>20</b>
23	5	5	4	5	<b>19</b>
24	5	5	5	5	<b>20</b>
25	5	5	5	5	<b>20</b>
26	5	5	5	5	<b>20</b>
27	5	5	5	5	<b>20</b>
28	5	5	5	4	<b>19</b>
29	5	5	5	5	<b>20</b>
30	5	5	4	5	<b>19</b>
31	4	5	5	5	<b>19</b>
32	5	5	5	5	<b>20</b>
33	5	5	4	5	<b>19</b>
34	5	5	4	5	<b>19</b>
35	5	4	5	5	<b>19</b>
36	5	5	4	5	<b>19</b>
37	5	5	5	5	<b>20</b>
38	4	5	4	5	<b>18</b>
39	5	4	5	5	<b>19</b>
40	5	4	5	4	<b>18</b>

**Lampiran 4****FREQUENCY VARIABEL Y****Statistics**

	Penge lolaan	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N	Valid	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		2090	168	172	176	174	176	170	178	172	174	184	180.0
													166.0
													0

**Frequency Table****Pengelolaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	48	4	10.0	10.0	10.0
	49	4	10.0	10.0	20.0
	50	4	10.0	10.0	30.0
	52	8	20.0	20.0	50.0
	53	6	15.0	15.0	65.0
	54	6	15.0	15.0	80.0
	55	6	15.0	15.0	95.0
	57	2	5.0	5.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**Y1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5.0	5.0	5.0
	3	2	5.0	5.0	10.0
	4	22	55.0	55.0	65.0
	5	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**Y2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.0	5.0	5.0
	4	24	60.0	60.0	65.0
	5	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**Y3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5.0	5.0	5.0
	3	2	5.0	5.0	10.0
	4	14	35.0	35.0	45.0
	5	22	55.0	55.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.0	5.0	5.0
	4	22	55.0	55.0	60.0
	5	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	24	60.0	60.0	60.0
	5	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	30	75.0	75.0	75.0
	5	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	22	55.0	55.0	55.0
	5	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.0	5.0	5.0
	4	24	60.0	60.0	65.0
	5	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5.0	5.0	5.0
	3	2	5.0	5.0	10.0
	4	16	40.0	40.0	50.0
	5	20	50.0	50.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	40.0	40.0	40.0
	5	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5.0	5.0	5.0
	4	14	35.0	35.0	40.0
	5	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.0	5.0	5.0
	4	30	75.0	75.0	80.0
	5	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**Lampiran 5****FREQUENCY VARIABEL X****Statistics**

		Pengawasan	X1	X2	X3	X4
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Sum		774	196.00	194.00	188.00	196.00

**Frequency Table****Pengawasan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	4	10.0	10.0	10.0
	19	18	45.0	45.0	55.0
	20	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**X1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	4	10.0	10.0	10.0
	5	36	90.0	90.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**X2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	6	15.0	15.0	15.0
	5	34	85.0	85.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**X3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	12	30.0	30.0	30.0
	5	28	70.0	70.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**X4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	4	10.0	10.0	10.0
	5	36	90.0	90.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**Lampiran 6**  
**OUTPUT REGRESSION**

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengawasan <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengelolaan

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 <sup>a</sup>	.250	.230	2.211

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.769	1	61.769	12.638	.001 <sup>a</sup>
	Residual	185.731	38	4.888		
	Total	247.500	39			

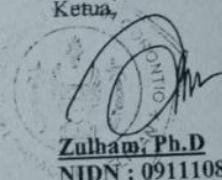
a. Predictors: (Constant), Pengawasan

b. Dependent Variable: Pengelolaan

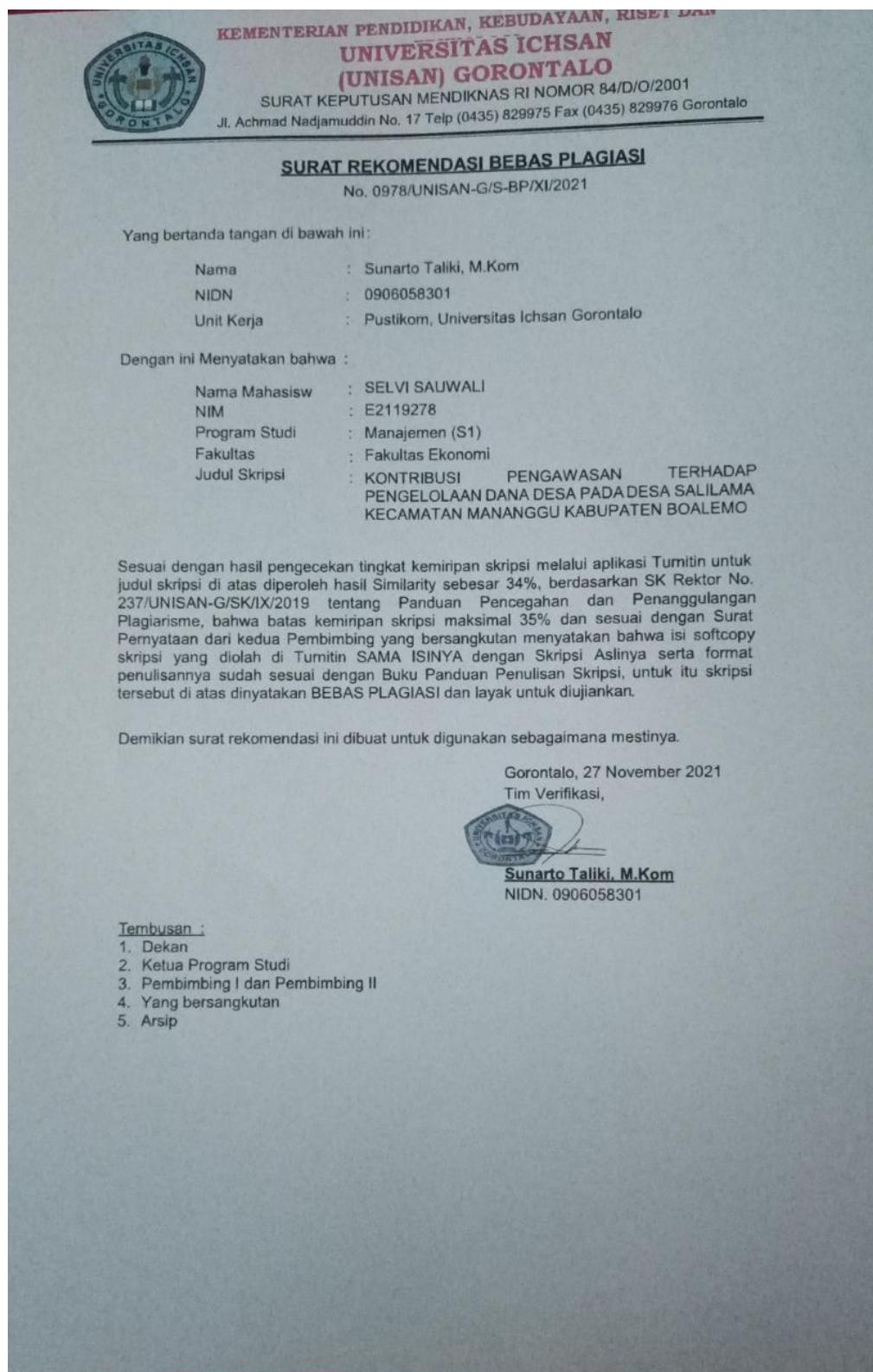
**Coefficients<sup>a</sup>**

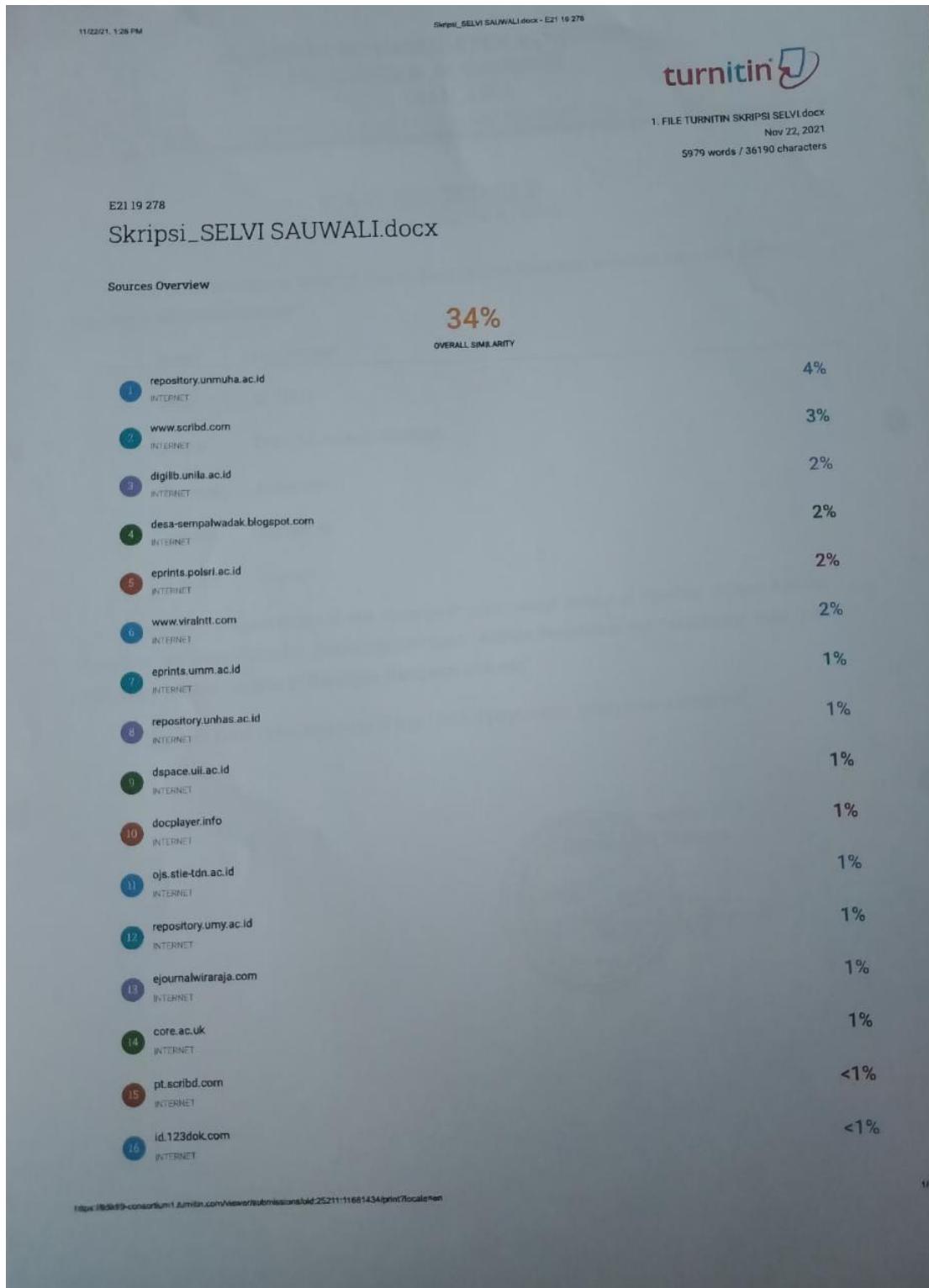
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	15.474	10.351	.500	1.495	.143
	Pengawasan	1.901	.535		3.555	.001

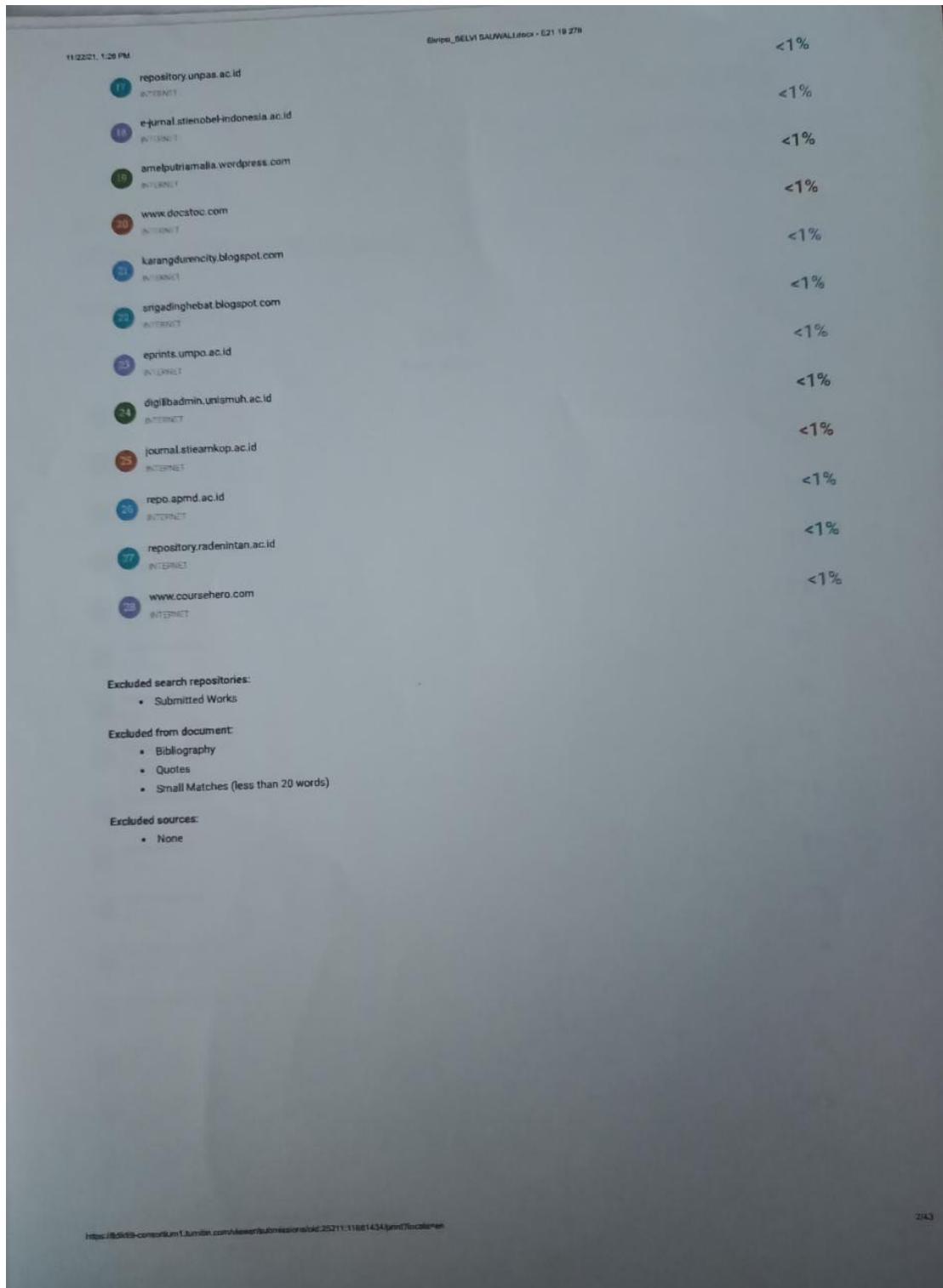
a. Dependent Variable: Pengelolaan

	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)</b> <b>UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO</b> Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: <a href="mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id">lembagapenelitian@unisan.ac.id</a>
No.:19147/PIP/LEMLIT-UNISAN/VII/2021	
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Zulham, Ph.D          NIDN : 0911108104          Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo</p> <p>Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:</p> <p>Nama Mahasiswa : Selvi Sauwali          NIM : E2119278          Fakultas : Ekonomi          Program Studi : Manajemen          Lokasi Penelitian : Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo          Judul penelitian : Analisis pengelolaan dan pengawasan dana desa pada Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo</p> <p>Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Gorontalo, 12 Juli 2021          Ketua,</p> <div style="text-align: right;">  <p><u>Zulham, Ph.D</u>          NIDN : 0911108104</p> </div>	









## CURRICULUM VITAE



### 1. Identritas Pribadi

Nama : Selvi Sauwali  
 NIM : E21.19.278  
 Tempat/Tgl Lahir : Salilama, 17 Januari 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Angkatan : 2019  
 Fakultas : Ekonomi  
 Jurusan : Manajemen  
 Konsentrasi : Keuangan  
 Alamat : Desa Dulomo, Kec. Patilanggio  
 Kabupaten Pohuwato

### 2. Riwayat Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 02 MANANGGU pada tahun 2010
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di SMP NEGERI 1 PATILANGGIO pada tahun 2013
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGERI 1 MANANGGU pada tahun 2016
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.